



RENCANA KERJA TAHUN 2023

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2023, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government guna mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Penyusunan RENJA Tahun 2023 belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan pemenuhan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua, Namun diharapkan hasil dari penyusunan ini dapat menjadi acuan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha.

Jayapura, April 2022


KEPALA BIRO,
DEBORA D. SALOSA, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19771223 200212 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2021	5
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021	5
2.2. Isu-Isu Penyelenggara Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	53
2.3. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	53
BAB III. TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	55
3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	55
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
BAB IV. PENUTUP	74
LAMPIRAN.	

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pelayananan pengadaan barang dan jasa sebagaimana prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan guna menjamin tercapainya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terbuka, transparan, akuntabel dan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua maka diperlukan suatu perencanaan yaitu Rencana Kerja Tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi dan dapat menjawab visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, tahun 2019-2023.
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai Dukumen Perencanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 yaitu :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023.
2. Sebagai sarana pengendalian progra dan kegiatan Tahun 2023;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** yang memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU** yang memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1, analisa kinerja tahun n-1, isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi, dan review terhadap rancangan awal RKPD.
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN** memuat tujuan dan sasaran Renja dan program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023.
- BAB IV PENUTUP**

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis terlihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Hasil Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Papua Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	97,11
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	6	3,04
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ oleh SKPD	Persen	85	86,11
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	50	96,67
		Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Level	3	3
		Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	Persen	100	100
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB	100

Dari tabel 2.1. bobot capaian realisasi yang tercapai 100% yaitu capaian tingkat kematangan UKPBJ, Penyelesaian sanggah pelaksanaan

tender/seleksi dan diharapkan tercapainya nilai SAKIP BB atas penilaian inspektorat. Sedangkan capaian lain masih di dibawah 100%. Hasil Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 pada tabel 2.1. secara rinci berdasarkan target output dan realisasi setiap sasaran strategis dijelaskan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Rincian Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Berdasarkan Target Output Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Jumlah realisasi hasil pelaksanaan tender/seleksi	Paket	104	101	97,11
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	6	3,04	56,67
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	Jumlah Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ oleh SKPD	SKPD	36	31	86,11
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Jumlah keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Orang	30	29	96,67
		Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Level	3	3	100
		Jumlah Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	Jumlah	16	16	100
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB	BB	100
Rata-rata Capaian (%)						90,93

Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 90,93 persen “sangat berhasil” dengan realisasi capaian terinci sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1. Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator yaitu :
 - a. Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dari target capaian indikator sebesar 100% tercapai 97,11%. Capaian ini dapat dijelaskan bahwa dari 104 paket tender yang diproses melalui mekanisme tender dan seleksi sebanyak 101 paket yang selesai proses tender/seleksi, sedangkan 3 paket terjadi gagal/batal tender. Rincian data paket tender per SKPD yang berproses pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

**Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Per
Jenis Pengadaan Tahun 2021**

NO	SATKER/SKPD	JUMLAH PAKET PER KATEGORI PENGADAAN (PAKET)				JUMLAH
		BARANG	KONSTRUKSI	JASA KONSULTANSI	JASA LAINNYA	
1	DPUPR	0	36	18	0	54
2	BAPENDA	2	2	0	0	4
3	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	2	1	0	0	3
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	2	0	0	3
5	DINAS KESEHATAN	4	2	0	0	6
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	0	1
7	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	1	2	1	1	5
8	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3	2	0	0	5
9	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	4	0	9
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0	1	0	1	2
11	RSUD JAYAPURA	0	5	2	0	7
12	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 999292	0	0	0	1	1
13	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	0	0	0	1	1
14	RUMAH SAKIT JIWA	0	0	0	1	1
15	SATPOL PP	0	0	0	1	1
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSIPAPUA	1	0	0	0	1
JUMLAH		16	57	25	6	104

Dari tabel 2.3. sebanyak 104 paket dokumen tender/seleksi yang masuk dan diproses pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua terbanyak berasal dari Dinas PUPR Provinsi Papua sebanyak 54 paket, Dinas Perhubungan 9 paket, RSUD Jayapura 7 paket, Dinas kesehatan 6 paket, Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga masing-masing 5 paket.

Dari 104 paket, sebanyak 103 paket selesai, dan 3 paket gagal/batal tender sebagaimana pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.
**Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2021**

NO	SKPD	REALISASI TENDER/SELEKSI				JUMLAH
		TENDER SELESAI	TENDER BERPROSES	TENDER ULANG	TENDER GAGAL/BATAL	
1	DPUPR	52	0	0	2	54
2	BAPENDA	4	0	0	0	4
3	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	3	0	0	0	3
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	0	0	0	3
5	DINAS KESEHATAN	6	0	0	0	6
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	0	1
7	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	5	0	0	0	5
8	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	0	0	0	5
9	DINAS PERHUBUNGAN	9	0	0	0	9
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2	0	0	0	2
11	RSUD JAYAPURA	7	0	0	0	7
12	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 999292	1	0	0	0	1
13	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	1	0	0	0	1
14	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	1	0	0	0	1
15	SATPOL PP	0	0	0	1	1
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSIPAPUA	1	0	0	0	1
JUMLAH (PAKET)		101	0	0	3	104

Dari tabel 2.4. dari 104 paket tender, yang terselesaikan 101 dan tender gagal/batal sebanyak 3 paket yaitu dokumen dari Dinas PUPR sebanyak 2 paket (paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KNPI Provinsi Papua (MYC), Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR (MYC)) dan dari Satpol PP sebanyak 1 paket (Pengadaan Makan dan Minum Anggota Kontrak/Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Bulan Oktober-Desember sebanyak 400 Anggota x 92 Hari TA.2021).

Alasan Paket Tender Gagal/Batal :

1. Paket Pembangunan Gedung Kantor KNPI Provinsi Papua (MYC)
Gagal/Batal tender dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
 2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR (MYC)
Gagal/batal tender dikarenakan Pada Tanggal 16 Desember 2021 Pokja Pemilihan menerima surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 050/11659 Tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembatalan Lelang Paket DTI.
 3. Pengadaan Makan dan Minum Anggota Kontrak/Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Bulan Oktober-Desember sebanyak 400 Anggota x 92 Hari TA.2021.
Gagal/batal tender dikarenakan berdasar Berita Acara Gagal Tender Nomor : 05/GGL-TDR/POKJA-BPBJ/PMM-SatpolPP/APB/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi. Evaluasi ulang dan tender ulang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia melewati Tahun Anggaran 2021.
- b.** Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ.
Dari 101 dokumen yang selesai proses tender diperoleh penghematan anggaran sebesar Rp. 53.837.187.702,- (Lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah) dari total HPS Rp. 1.772.455.658.798,- (Satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 3,04%. Hasil capaian penghematan dari hasil negosiasi penawaran harga dari target sebesar 6% hanya tercapai 3,04% atau 50,67%.

2. Sasaran strategis 2. Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik.

Sasaran strategis 2 terdiri dari 1 indikator yaitu :

a. Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ oleh SKPD.

Dari target capaian indikator sebesar 85% tercapai 92,03%. dapat dijelaskan dari 36 SKPD atau 86 satker di Pemerintah Provinsi Papua yang telah melakukan penginputan RUP baik melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP) dan Aplikasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua yaitu Aplikasi sistem informasi pengadaan pada website www.Singa2.Papua.go.id sebanyak 80 satker yang menginput dan 6 Satker yang tidak melakukan penginputan yaitu UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM, Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari 80 satker yang menginput sebanyak 66 satker yang telah memaketkan dan mengumumkan RUP atau 82,25%.

3. Sasaran strategis 3. Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ

Sasaran strategis 3 terdiri 3 indikator yaitu :

a. Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Sesuai amanat Pasal 74A ayat (2) dan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 secara jelas menyebutkan bahwa Pemda wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) berupa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan wajib menyusun rencana aksi Pemenuhan Pengelola PBJ. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya sudah harus mencapai 60% pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) hingga 31 Desember 2023.

Dari target capaian tahun 2021 sebesar 50% keterisian Jafung PPBJ yaitu target 30 orang baru bisa terpenuhi sebanyak 29 orang atau

96,77% yaitu 20 orang yang telah dilantik dan 9 orang telah lulus ujian kompetensi dan menunggu proses pelantikan sedangkan 1 orang tidak lulus ujian kompetensi dan akan dilakukan ujian ulang kompetensi mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lainnya.

Rekomendasi Pengangkatan dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5049/D.3/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, ditetapkan 20 org sebagai Jafung PPBJ pada Biro PBJ, denan rincian 10 orang yang telah Lulus Ujian Tertulis (tanggal 19 Pebruari 2021) dan 10 Orang Lulus melalui Ujian Portofolio, sebagai berikut :

1. Gangsar Cahyono / JF PPBJ Madya
2. Aminah Tajang / JF PPBJ Madya
3. Rini Setiawati Hasan / JF PPBJ Madya
4. Magdalena Wahyu Widayati / JF PPBJ Muda
5. Elisabeth Matelda Koibur / JF PPBJ Muda
6. Indra Rahmat Budyantho / JF PPBJ Muda
7. Kornelius Tumanan / JF PPBJ Muda
8. Grasius Victorius M Tambunan / JF PPBJ Muda
9. Rudolf Reyaan / JF PPBJ Muda
10. Dadang Nur Cahyo / JF PPBJ Muda
11. Ferdy Pattikayhatu / JF PPBJ Muda
12. Rizki Nur Inayah / JF PPBJ Muda
13. Yanoi K.S.L. Rumakito / JF PPBJ Muda
14. Samuel Andi Tomassoyan / JF PPBJ Muda
15. Swastika Windhuwardani / JF PPBJ Muda
16. Victor Anthony Bijak Marmulia / JF PPBJ Muda
17. Suryannu Lamba Pareken / JF PPBJ Muda
18. Sugito / JF PPBJ Pertama
19. Sahar / JF PPBJ Pertama
20. Jusnelli / JF PPBJ Pertama

Sedangkan 10 orang yang mengikuti Inpassing jabatan fungsional PPBJ melalui ujian portofolio dan ujian tulis perpindahan dari jabatan lain tahun 2021 tersajikan pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5.

**Pegawai Yang Mengikuti Ujian Portofolio Dan Ujian Tertulis Jabatan Fungsional PPBJ
Perpindahan Dari Jabatan Lain Tahun 2021**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JENJANG JF PPBJ	Hasil Uji kompetensi
1.	Leonardo Frans Samori, ST 198010022009021005	Penata Muda/ III.a	Pertama	Lulus
2.	Emosilo Kandipi, SH NIP. 19740725 200112 1 005	Penata Muda/ III.a	Pertama	Mengulang
3.	Paskalina, ST NIP. 19810420 200902 2 007	Penata Muda/ III.a	Pertama	Lulus
4.	Annies Liando, SE.,MM NIP. 19700420 199403 1 010	Penata/ III.c	Muda	Lulus
5.	Sonya Nontje Ruff, ST.,MM NIP. 19820128 201004 2 001	Penata/ III.c	Muda	Lulus
6.	Marthinus Manggaprouw, S.Pd.,M.si NIP. 19810129 200909 1 001	Penata/ III.c	Muda	Lulus
7.	Matius Monglo, S.Kom NIP. 19710815 200801 1 021	Penata Tk. I/ III.d	Muda	Lulus
8.	Mudiarto, SE NIP 19771128 200801 1 006	Penata Tk.I/III.c	Muda	Lulus
9.	Wabter Tampubolon, ST NIP. 19791228 200605 1 005	Penata Tk. I/ III.d	Muda	Lulus
10.	Haris Wakang, S.ST., MPSSp NIP 19730709 199712 1 001	Penata Tk.I/ IV.a	Madya	Lulus
	Jumlah Peserta	Lulus 2021	9 Orang	
		Mengulang 2022	1 Orang	

b. **Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ**

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain (proses domain, domain kelembagaan, domain SDM, dan domain sistem informasi) dan 9 variabel dimana setiap variabel memiliki 5 tingkat kematangan yang terdiri dari inisiasi, esensi, proaktif, strategis dan unggul. (*Peraturan LKPP No. 5/2019 Tentang Model Kematangan UKPBJ*).

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (*Peraturan LKPP No. 5/2019 Tentang Model Kematangan UKPBJ*).

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel meliputi:

1. Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko.
2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi,
3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan Pengembangan.
4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi.

Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yang terdiri dari :

1. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
2. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
3. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
5. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Hasil capaian tingkat kematangan UKPBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2021 telah mencapai level

proaktif atau level 3 atau terpenuhi dari rencana yang ditargetkan. Hasil capain itu telah memenuhi 9 variabel yang pada tahun 2020 baru mencapai 7 variabel. Atas dasar itu dengan pemenuhan tingkat kematangan organisasi UKPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada kematangan level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence).

C. Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan.

Hasil Capain indikator ini yaitu jumlah sanggahan yang terselesaikan sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Jumlah paket tender yang disanggah sebanyak 16 paket tender dengan 26 sanggahan dari peserta tender. Sanggahan yang diajukan oleh peserta tender/seleksi 100% terjawab oleh pokja dan Bagian Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

Tabel 2.6.

Jumlah Paket Tender dan Jumlah Sanggahan
Per Jenis Pengadaan Tahun 2021

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jumlah Sanggahan
Barang	3	7
Konstruksi	12	18
Jasa Konsultansi	0	0
Jasa Lainnya	1	1
Total	16	26

Jumlah paket terbanyak yang disanggah dalam proses tender yaitu pada paket tender konstruksi sebanyak 12 paket dengan jumlah sanggahan sebanyak 18 sanggahan.

Rincian dari 16 paket tender/seleksi yang disanggah selama proses pemilihan seperti tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.7.
Paket Tender/Seleksi yang Dissangah
Selama Proses Pemilihan Peyedia

No	Paket Pekerjaan	Sanggahan		
		Perusahaan	Tanggal Sanggahan	Tanggal Jawab Sanggahan
1	Belanja Makan Minum Semua Aktifitas PPLP	1. CV. Nada Papua	3 April 2021	9 Maret 2021
2	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ifar Gunung (MYC)	1. PT. Sumber Papua Indah	19 Juni 2021	24 Juni 2021
3	Penyediaan Makanan Tamahan untuk Bumil KEK	1. PT. Baliem Medika Papua	Terlampir	Terlampir
		2. PT. Apik Baraya Sejahtera	Terlampir	Terlampir
		3. CV. Sinergy Bersama Indonesia	Terlampir	Terlampir
4	Pengadaan Penyediaan Makanan Tambahan Untuk Balita Kurus	1. PT. Bintang Pratama Sentosa	8 Juni 2021	10 Juni 2021
		2. PT. Rajawali Nusindo	8 Juni 2021	10 Juni 2021
		3. PT. Satoria Distribusi Lestari	8 Juni 2021	10 Juni 2021
5	Pembangunan Dermaga PPI Poumako Kabupaten Mimika	1. CV. Barata Jaya Mandiri	Terlampir	Terlampir
6	Pembangunan Jalan Nume - Mamit	1. CV. Reka Mandiri	Terlampir	Terlampir
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB Beserta Perabotnya SMA Asiki	1. CV. Graciano Armando Jaya	26 Juli 2021	29 Juli 2021
8	Pembangunan Asrama Siswa SMA Negeri 1 Kuruik Beserta Perabotnya (2 Unit)	1. CV. Nupuri Mandiri	26 Juli 2021	29 Juli 2021
		2. CV. Garciano Armando jaya	26 Juli 2021	29 Juli 2021
		3. CV. Sagoe Megakarya	26 Juli 2021	29 Juli 2021
9	Pengadaan Pengadaan Prakti Kendaraan Ringan Otomotif SMK N 1 Nabire Yahun 2021	CV. Pelangi Mitarou	02 Agustus 2021	04 Agustus 2021
10	Pembangunan Lapangan Terbang Saminage di Kabupaten Yahukimo	1. PT. Urampi Indah Pratama	09 Agustus 2021	
11	Pembangunan Lapangan Terbang Mamit di Kabupaten Tolikara	1. PT. Gelogu Dimbia Papua	13 Agustus 2021	
12	Pembangunan Pengaman Pantai Holtekam	1. CV. Haturiri - KSO - CV. Mak Kumeser	12 Agustus 2021	16 Agustus 2021
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Salor (DAK)	1. PT. Sinar Muara Bian	17 Maret 2021	21 Maret 2021
		2. PT. Dwi Citra Adi Perkasa	9 Maret 2021	21 Maret 2021
14	Pembanguan Jalan masuk Buper (Goa Maria) - Perumnas III	PT. Biri Indah Mandiri	11 Agustus 2021	18 Agustus 2021
15	Pembangunan Gedung Kantor KNPI Provinsi Papua (MYC)	PT. Delima Agung Utama - KSO - PT. Sakata Utama	11 Oktober 2021	Terlampir
16	Pembangunan Jalan Holtekam (PLTD) - Pasir III Tahap II (MYC)	1. PT. Urampi Indah Pratama	26 September 2021	01 Oktober 2021
		2. PT. Mamberamo Trad Coy	27 September 2021	01 Oktober 2021
		3. PT. Melonasia Mulia	28 September 2021	01 Oktober 2021

4. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua

Sasaran strategis 4 terdiri 1 indikator yaitu : Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua

Hasil capaian penilaian SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan bisa mencapai nilai BB. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat Tahun 2020 dengan kategori B, dan berdasarkan catatan tersebut telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyajian informasi mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga diharapkan hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat dengan kategori BB.

B. Capaian Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran kinerja Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 35 sub kegiatan dapat dijelaskan pada tabel 2.8. sebagai berikut :

Tabel 2.8.

**Realisasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN REALISASI	
			TARGET FISIK	REALISASI (%)
	RATA-RATA CAPAIAN FISIK PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		100	92,83%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100	91,45%
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, dan penganggaran serta kinerja SKPD yang baik.	100	82,30
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan daerah	2 dokumen	29,17
	• Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya kordinasi penyusunan okumen RKA-SKPD	1 dokumen	100
	• Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya kordinasi dan penyusunan dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	100
	• Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja SKPD dan Penilaian SAKIP Tahun 2021	1 Laporan	100

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	Iktisar realisasi kinerja SKPD			
	b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan dan penataan SPJ keuangan Biro PBJ yang akutable		37,35
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan sKPD	Terbayarnya gaji dan Tunjangan Pegawai Biro PBJ Tahun 2021	1 Tahun	81,38
	• Kordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Biro PBJ	1 Laporan	6,67
	• Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD per bulan/trwulan dan semesteran	3 laporan	24
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawain perangkat daerah	Terwujudnya disiplin dan kinerja Pegawai Biro PBJ	100%	100
	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Pegawai Biro PBJ	106 stel	100
	• Pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> o Diklat PIM 2 orang o Jumlah Bimtek 3 kegiatan 	100
	d. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Meningkatnya layanan umum administrasi kantor	100	98,94
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	42 unit	98,17
	• Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah cetakan o Jumlah penggandaan 	5 jenis 15000 lbr	100
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah langganan edisi surat kabar 	3 jenis	100
	• Penyediaan Bahan/material	Jumlah bahan/material layanan administarasi kantor (ATK)	1 Paket	100
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kegiatan kantor	12 Bulan	100
	• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kordinasi/Konsultasi luar dan dalam daerah	2 kegiatan	95,46
	e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Umum pemerintah daerah	Bertambahnya barang milik daerah urusan umum Biro PBJ	100 persen	98,98
	• Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	99,07
	• Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	14 unit	98,90
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan penunjang urusan Kantor	100%	100
	• Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya layanan penunjang administrasi urusan kantor	1 Tahun	100
	• Penyediaan Jasa	Jumlah jasa tenaga layanan	13 orang	100

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	Pelayanan umum Kantor	umum keamanan dan kebersihan kantor		
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan penunjang urusan Kantor	100%	93,87
	• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	97,28
	• Pemeliharaan aset tetap lainnya	o Sewa gudang o Persediaan alat listrik	1 unit 3 paket	85
	• Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dengan bangunan lainnya	Pemeliharaan sarana peralatan kantor	11 unit	99,33
2	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			94,05%
	a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya	3 dokumen	97,66
	• Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan jasa	o Terlaksananya penyusunan dokumen harga pasar o Tersusunya dokumen perencanaan e-katalog	1 dokumen 1 laporan	100 100
	• Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Persen dokumen paket tender/seleksi yang terselesaikan dari dokumen yang ditenderkan/seleksi	100%	90,66
	• Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa	Terdatannya hasil pelaksanaan tender dan hasil penghematan anggaran	1 Laporan	100
	b. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	100	98,38
	• Pengelolaan sistem secara elektronik	Pemanfaatan layanan LPSE	1 Tahun	100
	• Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah sarana layanan yang difasilitasi	3	100
	• Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Informasi yang tersampaikan secara online	100%	100
	c. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Meningkatnya SDM PBJ dan Penyelesaian sengkahan PBJ	100%	100
	• Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	o Jumlah ASN yang mengikuti inpassing Jabatan fungsional o Jumlah keikutsertaan ASN yang mengikuti pembinaan	10 orang 50 orang	100
	• Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	o Jumlah Pembinaan kelembagaan o Pencapaian Variabel tingkat kematangan	2 kali Level 3	100
	• Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	o Bimtek Aspek Hukum PBJ o Persen Jawaban sengkahan yang terselesaikan	1 kegiatan 100%	100

Dari tabel diatas rata-rata capaian realisasi fisik pelaksanaan program tahun 2021 sebesar 92,83% yang terdiri dari realisasi program penunjang urusan daerah sebesar 91,45% dan realisasi program kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebesar 94,05%. Rincaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Urusan Daerah

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan dengan realisasi fisik sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Rata-rata realisasi kegiatan ini dengan indikator terpenuhinya dokumen perencanaan, dan penganggaran serta kinerja SKPD yang baik dengan capaian realisasi fisik 87,19%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Capain realisasi fisik sebesar 29,18% dimana dalam pelaksanaanya terealisasi yaitu tersedianya ATK penyusunan, tercetaknya dokumen perencanaan, dan terbayarnya honor tim penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan yang tidak terealisasi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu perjalanan dinas dalam rangka kordinasi.

b. Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Capaian realisasi fisik sebesar 100% yaitu tersedianya ATK , tersedianya bahan komputer habis pakai, makan minum rapat penyusunan, dan terbayarnya honor tim penyusunan RKA.

c. Kordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Capaian realisasi fisik sebesar 100% yaitu terbayarnya honor rim penyusunan perubahan RAK-SKPD sebanyak 5 orang, dan tersedianya makan minum rapat penyusunan.

d. Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar realisasi kinerj SKPD

Capaian realisasi fisik sebesar 100% yaitu tersedianya ATK penyusunan, tersianya bahan komputer, tersedainya makan minum penyusunan dan terbayarnya honor tim penyusunan laporan.

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 37,35%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan SKPD

Capaian realisasi fisik sebesar 81,38% yaitu terbayarnya gaji pegawai Biro Pengadaan barang dan Jasa selama 12 Bulan dan 1 bulan gaji ke 13 sebanyak 65 pegawai dan terbayarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan presetasi kerja. Tidak tercapainya Capaian realisasi fisik 100% karena untuk perhitungan pembayaran tambahan penghasilan dipengaruhi oleh kehadiran dan aktivitas pegawai.

b. Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Capaian realisasi fisik sebesar 6,67%. Capaian sebesar ini disebabkan karena tidak terbayarnya honor tim penyusunan, dan hanya terealisasi belanja ATK dan penggandaan dokumen laporan. Dengan capaian ini laporan keuangan akhir tahun selesai dibuat.

c. Kordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Capaian realisasi fisik sebesar 24%. Capaian sebesar ini disebabkan karena hanya terealisasi pada belanja penyediaan ATK, penyediaan bahan komputer habis pakai, dan terealisasi 96,77% makan minum rapat penyusunan. Dengan capaian realisasi fisik sebesar 24% namun laporan TP2K selesai disusun setiap bulannya.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 99,08%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya.

Capaian realisasi fisik sebesar 100%. Teralisasinya Capaian fisik sub kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian dinas keki, pakain putih, pakain batik pejabat, pakaian PSR pejabat eselon II dan III dan pakaian satgas keamanan kantor.

b. Pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Capaian realisasi fisik sebesar 100%. Teralisasinya Capaian fisik sub kegiatan ini yaitu :

- Keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) TK II yang diikuti oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua “ Ibu Debora D. Salossa,S.Hut, MM dengan predikat kelulusan terbaik pertama dari 60 peserta.
- Keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikuti oleh Kepala Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa “ Ibu Sohna Mu’saad, SP,M.Si.
- Keikutsertaan pegawai dalam bimtek penatausahaan keuangan dan kepegawaian.
- Mengikuti bimtek sinkronisasi Modul Dokumen Pemilihan (MDP) jasa konstruksi yang didan tata cara evaluasi penawaran jasa konstruksi penyusunan perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat sesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Sorong Papua Barat tanggal 24 s.d 24 Nopember 2021 yang diikuti oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, Pokja PPBJ dan staf.
- Tersediannya alat tulis kantor kegiatan

- Tersedianya cetak dokumen laporan Diklat Kepemimpinan
- Terealisasinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka Diklat dan bimtek.

4. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 98,94%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Capaian realisasi fisik sebesar 98,17% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- ATK pelaksanaan pengadaan
- Pengadaan mesin penghancur kertas 3 unit
- Laptop sebanyak 4 unit
- Mesin foto copy 1 unit
- Pengadaan komputer PC All in one 15 unit
- Pengadaan mesin scanner 2 unit
- Pemeliharaan komputer kantor 8 kali
- Tidak terealisasinya pembayaran honor pejabat pengadaan.

b. Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Tercetaknya dokumen dan SPM
- Tercetaknya dokumen hasil pelaksanaan tender/seleksi dan administrasi kantor
- Tercetaknya map kantor
- Tersusun dan tercetaknya dokumen Review Renstra
- Tercetaknya spanduk dan baliho kegiatan kantor

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terlaksananya langganan surat kabar dan majalah selama 1 tahun.

d. Penyediaan Bahan/material.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Biro Pengadaan barang dan jasa.
- Terlaksananya penyediaan bahan kesehatan (Masker, Tissue kering dan tissue basah dan hansanitizer) dalam rangka pencegahan covid 19.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terlaksananya penyediaan makan dan minum pokja.
- Terlaksananya penyediaan makan minum kegiatan dalam rangka mendukung pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Capaian realisasi fisik sebesar 95,46% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Tersedianya ATK kegiatan 100%
- Terlaksananya kordinasi/konsultasi dan pembuktian lapangan dalam mendukung pelaksanaan tender/seleksi pengadaan barang dan jasa sebesar 95,44%.
- Terlaksananya kordinasi melalui perjalanan dinas dalam kota 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 98,98%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan.

Capaian realisasi fisik sebesar 99,07% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat eselon II dan III sebanyak 2 Unit terealisasi 100%.
- Terlaksannya cetak dokumen pengadaan 100%
- Tidak terealisasinya pembayaran honor pejabat pengadaan.
- Pengadaan mesin penghancur kertas 3 unit

b. Pengadaan Pengadaan Mebel.

Capaian realisasi fisik sebesar 98,90% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Tersedia ATK pengadaan
- Cetak dokumen pengadaan
- Terlaksannya pemeliharaan kantor 1 paket
- Terlaksannya pengadaan AC split sebanyak 10 unit
- Terlaksana dan terpasangnya AC standing 5 PK sebanyak 4 unit.
- Tidak terbayarnya honor pejabat pengadaan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 100%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa Surat Menyurat.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terbayarnya honor 5 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selama 12 bulan

- Tersedianya ATK administrasi surat menyurat
- Tersedianya benda pos materai mendukung administrasi kantor
- Tersedianya bahan operasional kantor sub bagian TU
- Terbayarnya beban lembur di luar jam kantor bagi Pokja pemilihan.
- Terlaksannya sewa kendaraan keperluan urusan kantor.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Tersediannya makan minum jaga malam kantor bagi Satgas Pengamanan kantor.
- Terealisasinya penyediaan bahan kebersihan kantor
- Terbayarnya jasa tenaga kebersihan kantor 2 orang selama 12 bulan.
- Terbayarnya jasa keamanan kantor sebanyak 12 orang terdiri dari 4 orang staf, 5 orang satgas papeda selama 12 orang.
- Terbayarnya sewa kendaraan mendukung layanan umum kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 93,87%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan.

Capaian realisasi fisik sebesar 97,28 % pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terealisasinya 100% penyediaan Bahan Bakar kendaraan operasional kantor.
- Tidak terealisasinya pembayaran pajak kendaraan dinas kantor.

- Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit/
- b. Pemeliharaan aset tetap lainnya.
Capaian realisasi fisik sebesar 85% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:
 - Terealisasinya sewa satu unit gudang penyimpanan dokumen tender.
 - Terealisasinya 50% penyediaan alata/bahan kebutuhan listrik kantor.
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dengan bangunan lainnya.
Capaian realisasi fisik sebesar 99,33% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:
 - Terealisasinya cetak dokumen pejabat pengadaan.
 - Terlaksannya pengadaan paket pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor/pemasangan teralis pengaman kantor pasca pemindahan kantor.
 - Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan 1 unit.
 - Tidak terealisasinya pembayaran honor pejabat pengadaan.

B. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Realisasi capaian program ini sebesar 98,68% yang merupakan rata-rata realisasi dari 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 94,66%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

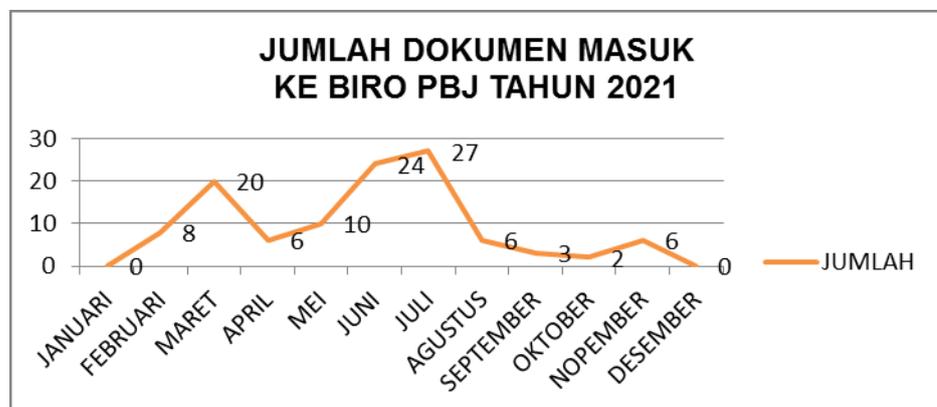
- Terealisasinya penyediaan ATK penyusunan Buku Standar Satuan Harga.

- Terealisasinya cetak dokumen hasil penyusunan Buku Standar Satuan Harga.
 - Terealisasinya penyediaan bahan komputer habis pakai penyusunan Buku Standar Satuan Harga.
 - Terlaksanannya penyediaan makan minum rapat sosialisasi Perlem 12 Tahun 2021.
 - Terlaksanannya penyediaan makan minum penyusunan Buku Standar Satuan Harga.
 - Terbayarnya honor narasumber rapat sosialisasi Perlem 12 Tahun 2021.
 - Terbayarnya honor tim penyusunan Buku Standar Satuan Harga.
 - Terbayarnya honor panitia kegiatan sosialisasi Perlem 12 Tahun 2021
 - Terealisasinya sewa kendaraan dalam rangka sosialisasi perlem 12 tahun 2021, kegiatan e katalog dan pengantaran dokumen pelaksanaan tender.
 - Terealisasinya sewa tempat pertemuan dalam rangka sosialisasi Perlem 12 Tahun 2021.
 - Terealisasinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka kordinasi/konsultasi, survei harga satuan dan sosialisasi Perlem 12 tahun 2021.
- b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.**
- Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:
- Terbayarnya honor pengelola UKPBJ sesuai SKGubernur Nomor 188.4/55/Tahun 2021 taggal 22 Januari 2021 tentang pengangkatan kelompok kerja dan penetapan tunjangan profesi perangkat layanan pengadaan barag/jasa Pemerintah Provinsi Papua. Capaian ini sebesar 89,89% dikarenakan pembayaran insentif pokja pemilihan disesuaikan dengan jumlah paket

tender/seleksi yang dikerjakan oleh pokja berdasarkan surat perintah tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

- Terealisasinya penyediaan ATK kegiatan sub bagian.
- Terealisasinya cetak dokumen tender dan administrasi sub bagian.
- Terealisasinya penyediaan makan minum rapat internal sub bagian.
- Terbayarnya biaya telpon/komunikasi terkait pelaksanaan tender/seleksi ke SKPD.
- Terealisasinya sewa kendaraan mendukung mobilisasi pengantaran dokumen hasil tender ke SKPD dan kegiatan sub bagian.
- Terelaksanya pemeliharaan komputer 10 unit.
- Terealisasinya perjalanan dinas dalam rangka pertemuan teknis, pembuktian lapangan oleh pokja pemilihan, kordinasi ke SKPD dan Kabupaten/Kota tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dari hasil capaian pelaksanaan tender /seleksi pengadaan barang dan jasa Tahun 2021 berdasarkan dokumen masuk sebagai berikut :



Grafik 2.1. Jumlah Dokumen Masuk Per Bulan Tahun 2021

Jumlah dokumen masuk dari SKPD ke ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi tahun 2021 sebanyak 112 Paket. Dokumen masuk terbanyak pada bulan Maret, Juli dan Agustus. Kondisi ini dipengaruhi oleh persiapan SKPD yang lambat dalam proses perencanaan pengadaan, KAK, persiapan pengadaan dan penginputan RUP. Kondisi lainnya disebabkan karena adanya perubahan/pergeseran dan rasionalisasi anggaran yang mempengaruhi dalam proses perencanaan.

Dari 112 dokumen yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 per jenis pengadaan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Data Dokumen Masuk Per Jenis Pengadaan
Tahun 2021

BULAN	BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTANSI	JASA LAINNYA	JUMLAH
JANUARI	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	3	4	1	8
MARET	1	14	2	3	20
APRIL	0	5	1	0	6
MEI	0	5	4	1	10
JUNI	7	12	4	1	24
JULI	2	11	14	0	27
AGUSTUS	1	2	3	0	6
SEPTEMBER	0	1	1	1	3
OKTOBER	1	1	0	0	2
NOPEMBER	0	6	0	0	6
DESEMBER	0	0	0	0	0
TOTAL	12	60	33	7	112

Dari tabel diatas, jumlah dokumen masuk per jenis pengadaan untuk ditenderkan terbanyak pada jenis pengadaan paaekerjaan Konstruksi 60 dokume, Konsultansi 33 dokumen, Barang 12 Dokumen dan jasa lainnya 7 dokumen.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- o Terealisasinya penyediaan ATK Penyusunan laporan hasil tender dan penyusunan Buku Kerja Pokja Pemilihan.

- Terealiisasinya cetak laporan hasil tender per bulan dan penyusunan buku kerja pokja pemilihan.
- Terealisasinya makan minum rapat penyusunan laporan dan penyusunan buku kerja pokja.
- Terbayarannya honor tim monev dan penyusunan laporan hasil tender serta honor tim penyusunan buku kerja pokja pemilihan.
- Terealisasinya sewa kendaraan dalam rangka monev dan dukungan operasional sub bagian.
- Terealisasinya perjalanan dinas dalam kota, dalam daerah dalam rangka kordinasi,konsultasi dan monitoring serta pendampingan ke SKPD dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan probity audit bersama inspektorat sebagai bagian dari Renaksi KPK dan pertemuan MCP, serta pertemuan bersama DPRP Komisi II sebagai mitra kerja guna menyampaikan proses pelaksanaan tender yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
- Terealisasinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kordinasi/konsultasi ke LKPP, UKPBJ Jakarta, dan pertemuan teknis dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan monev.

Caian realisasi Sub output kegiatan ini sebagaimana dalam pelaksanaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Data Realisasi tender Tahun 2021

Tabel 2.10.
Realisasi Pelaksanaan Tender Per Kategori Pengadaan
Tahun 2021

NO	SATKER/SKPD	JUMLAH PAKET PER KATEGORI PENGADAAN (PAKET)				JUMLAH
		BARANG	KONSTRUKSI	JASA KONSULTANSI	JASA LAINNYA	
1	DPUPR	0	36	18	0	54
2	BAPENDA	2	2	0	0	4
3	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	2	1	0	0	3
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	2	0	0	3

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

5	DINAS KESEHATAN	4	2	0	0	6
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	0	1
7	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	1	2	1	1	5
8	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3	2	0	0	5
9	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	4	0	9
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0	1	0	1	2
11	RSUD JAYAPURA	0	5	2	0	7
12	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 999292	0	0	0	1	1
13	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	0	0	0	1	1
14	RUMAH SAKIT JIWA	0	0	0	1	1
15	SATPOL PP	0	0	0	1	1
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1	0	0	0	1
	JUMLAH	16	57	25	6	104

Dari data diatas jumlah paket yang berproses dalam pelaksanaan tender/seleksi oleh pokja pemilihan tahun 2021 sebanyak 104 paket dengan paket terbanyak terbanyak berasal dari Dinas PUPR Provinsi Papua.

Dari 104 paket tender/seleksi yang berproses, paket yang selesai, gagal/batal dan tender ulang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.

Realisasi Tender Selesai, Gagal/Batal Tender/ Tender Ulang
Tahun 2021

NO	SKPD	REALISASI TENDER/SELEKSI				JUMLAH
		TENDER SELESAI	TENDER BERPROSES	TENDER ULANG	TENDER GAGAL/ BATAL	
1	DPUPR	52	0	0	2	54
2	BAPENDA	4	0	0	0	4
3	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	3	0	0	0	3
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	0	0	0	3
5	DINAS KESEHATAN	6	0	0	0	6
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	0	1
7	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	5	0	0	0	5
8	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	0	0	0	5
9	DINAS PERHUBUNGAN	9	0	0	0	9
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2	0	0	0	2

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

11	RSUD JAYAPURA	7	0	0	0	7
12	KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 999292	1	0	0	0	1
13	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	1	0	0	0	1
14	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	1	0	0	0	1
15	SATPOL PP	0	0	0	1	1
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1	0	0	0	1
JUMLAH (PAKET)		101	0	0	3	104

Jumlah paket tender/seleksi selesai dilaksanakan proses pemilihan sampai dengan penetapan pemenang sebanyak 101 paket dan paket tender yang gagal/batal sebanyak 3 paket.

3 Paket tender/seleksi gagal/batal terdiri dari paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KNPI Provinsi Papua (MYC), Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR (MYC), dan Pengadaan Makan dan Minum Anggota Kontrak/Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Bulan Oktober-Desember sebanyak 400 Anggota x 92 Hari TA.2021.

Alasan Paket Tender Gagal/Batal :

- a. Paket Pembangunan Gedung Kantor KNPI Provinsi Papua (MYC)
Gagal/Batal tender dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
- b. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR (MYC)
Gagal/batal tender dikarenakan Pada Tanggal 16 Desember 2021 Pokja Pemilihan menerima surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 050/11659 Tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembatalan Lelang Paket DTI.
- c. Pengadaan Makan dan Minum Anggota Kontrak/Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Penanggulangan Bencana Daerah Bulan Oktober-Desember sebanyak 400 Anggota x 92 Hari TA.2021.

Gagal/batal tender dikarenakan berdasar Berita Acara Gagal Tender Nomor : 05/GGL-TDR/POKJA-BPBJ/PMM-SatpolPP/APB/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi. Evaluasi ulang dan tender ulang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia melewati Tahun Anggaran 2021.

Dari data tender yang berproses, ada paket yang dilakukan tender ulang sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2.12.

Realisasi Tender Selesai, Gagal/Batal Tender dan Tender Ulang Tahun 2021

NO	NAMA PAKET	SKPD	KET			
			DALAM PROSES	SELESAI	GAGAL / BATAL	PL
1	Pembangunan Dermaga Danau di Belakang Terminal Waena	DPUR		√		
2	Pengadaan peralatan praktek utama teknik kendaraan ringan otomotif SMK swasta YPK 2 Biak Kabupaten Biak Numfor	DINAS PENDIDIKAN		√		
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		√		
4	Penyediaan Makanan untuk Tambahan Balita Kurus	DINAS KESEHATAN		√		
5	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen Spesifikasi : Pembangunan Stadion Rugby Tender	DINAS OLAHRAGA		√		
6	Peningkatan dan pelebaran jalan ifar gunung (MYC)	DPUR			√	√
7	Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp	DPUR		√		
8	Belanja Kendaraan Dinas Roda 4	PERHUBUNGAN			√	√
9	Belanja Kendaraan Dinas Operasional Tender Ulang	DINAS OLAHRAGA		√		
10	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PUPR PROVINSI PAPUA (MYC)	DPUR			√	
11	Belanja Cenderamata Bagi Purna Tugas Tender Ulang	BKD				√

Dalam pelaksanaan proses pemilihan terdapat 11 paket tender/seleksi yang dilakukan tender/seleksi ulang dimana semua paket tersebut selesai.

2. Penghematan Anggaran Pelaksanaan Tender/ Seleksi 2021

Tabel 2.13.

Realisasi Penghematan Anggaran Tahun 2021

NO	SKPD	REALISASI TENDER SELESAI				
		JUMLAH PAKET SELESAI	HPS	NEGOSIASI	PENGHEMATAN	%
1	DPUPR	52	1.261.701.335.930	1.221.342.601.885	40.358.734.045	3,20
2	BAPENDA	4	8.823.319.355	8.227.258.688	596.060.667	6,76
3	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	3	8.624.699.999	8.618.312.440	6.387.560	0,07
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	8.523.375.343	8.284.959.236	238.416.106	2,80
5	DINAS KESEHATAN	6	41.107.147.820	38.423.853.144	2.683.294.676	6,53
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	2.499.334.057	2.382.876.758	116.457.299	4,66
7	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	5	173.241.509.875	170.498.452.132	2.743.057.743	1,58
8	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	13.250.681.883	11.547.990.449	1.702.691.435	12,85
9	DINAS PERHUBUNGAN	9	28.135.358.991	25.015.430.104	3.119.928.888	11,09
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2	3.952.296.077	3.522.432.924	429.863.153	10,88
11	RSUD JAYAPURA	7	112.403.812.837	111.215.628.612	1.188.184.225	1,06
12	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 999292	1	108.362.369.800	107.903.872.280	458.497.520	0,42
13	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	1	749.980.330	605.023.694	144.956.636	19,33
14	RUMAH SAKIT JIWA	1	1.080.436.500	1.029.778.750	50.657.750	4,69
15	SATPOL PP	0		-		-
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI IPAPUA	1	1.179.233.000	1.179.233.000	-	-
JUMLAH		101	1.772.455.658.798	1.718.618.471.096	53.837.187.702	3,04%

Hasil efisiensi anggaran dari pelaksanaan tender/seleksi sebesar Rp. 53.837.187.702,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah) atau 3,04 persen.

3. Renaksi KPK pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui pencapaian Monitoring Center Prevention (MCP) Stanas PK. MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu dari renaksi KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Indikator MCP terhadap area pengadaan barang jasa meliputi : Reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa, data base vendor, evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa, advokasi pengadaan barang dan jasa, Standar Operasional Prosedur, dan TPP Khusus.

Variabel yang dilaporkan dalam pelaksanaan MCP khususnya aspek pengadaan barang dan jasa telah dilaporkan melalui inspektorat, kecuali TPP khusus sampai dengan tahun 2021 masih dalam proses pengusulan penyusunan peraturan Gubernur tentang TPP Khusus pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hasil pelaksanaan MCP adalah tersusunnya laporan MCP pengadaan barang dan jasa yang disampaikan ke inspektorat.

4. **Pelaksanaan Probity Audit .**

Probity Audit diartikan sevbagai Good Process yaitu proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip dan Etika pengadaan barang dan jasa (*principles/probity*) yang berlandaskan integritas, kebenaran dan kejujuran (*value*) untuk memeuhi ketentuan perundangan yang berlaku. pelaksanaan probity audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh inspektorat terhadap paket strategis antarlain paket pengadaan yang menjadi sampel yaitu paket pekerjaan Pembangunan Gedung KNPI, Pembangunan gedung Dinas PUPR, Rancang dan Bangun gedung Kantor Gubernur. Sebelum proses pelaksanaan probity dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis.

5. **Pelaksanaan Penyusunan Buku Kerja Pokja Pemilihan .**

Tujuan dari penyusunan buku Kerja pokja pemilhan yaitu untuk Mewujudkan tertib administrasi sesuai prinsip dan etika pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada pelaksanaan tender/seleksi, tersusunnya Buku Kerja Pokja Pemilihan sebagai acuan kerja pokja dalam proses pelaksanaan tender/seleksi dan terstandarnya sistem kerja pada setiap paket pekerjaan yang ditenderkan/seleksi.

Hasil dari capaian ini adalah tersusunnya model buku kerja dan lembar kerja bagi pokja pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

6. **Pelaksanaan monitoring ke SKPD**

Pelaksanaan monitoring ke SKPD untuk memantau progres pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan langsung. Dari hasil monitoring dan penyampaian surat Sekretaris Daerah

tentang penyampaian data hasil pelaksanaan pengadaan langsung di SKPD, hanya beberapa SKPD yang menyampaikan laporan laporan hasil pengadaan langsung ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kebutuhan data sangat penting khususnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pengadaan langsung terhadap pemberdayaan pelaku usaha papua.

2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 98,38%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Sistem Secara Elektronik.

Capaian realisasi fisik sebesar 95,15% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terbayarnya insentif pengelola LPSE yang hanya terealisasi sebesar 93,76%.
- Terealisasinya penyediaan bahan bakar mendukung operasional kendaraan Bagian LPSE.
- Terealisasinya penyediaan ATK.
- Terealisasinya cetak dan penggandaan dokumen LPSE.
- Terealisasinya makan minum rapat kegiatan LPSE.
- Terfasilitasi paket telpon pra bayar mendukung komunikasi petugas LPSE.
- Terlaksananya sewa kendaraan mendukung operasional pelaksanaan kordinasi pelayanan LPSE.
- Terealisasinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dan dalam daerah dalam rangka kordinasi dan penampungan SKPD terkait penginputan RUP dan pemanfaatan layanan aplikasi sistem informasi pengadaan “Singa2.papua.go.id”.

○ Terealisasinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kordinasi/konsultasi dan pertemuan teknis LPSE

○ Terealisasinya penyediaan alat komunikasi petugas LPSE

Capaian realisasi fisik sub kegiatan dalam pelaksanaannya dihasilkan sub output sebagai berikut :

1. Realisasi Data RUP

Penginputan Rencana Umum Pengadaan yang terinput pada aplikasi sirup.lkpp.go.id tahun 2021 seperti tertera pada data dibawah ini :

Tabel 2.14.

Realisasi Penginputan RUP Tahun 2021

NO	METODE	JUMLAH (PAKET)
1.	Tender	107
2.	Tender Cepat	7
3.	Pengadaan Langsung	1.957
4.	E Purchasing	107
5.	Seleksi	23
6.	Penunjukan Langsung	157
Total Rup Melalui Penyedia (Paket)		2.358
Rup Melalui Swakelola (Paket)		2102
Total		4.460

2. Realisasi Penginputan RUP oleh SKPD.

Dari 36 SKPD atau 86 satker di Pemerintah Provinsi Papua yang telah melakukan penginputan RUP sebanyak 80 satker yang menginput dan 6 Satker yang tidak melakukan penginputan yaitu UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM, Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari 80 satker yang menginput sebanyak 66 satker yang telah memaketkan dan mengumumkan RUP atau 82,25%.

3. Tercapainya 17 standarisasi pengelolaan SPSE

Dalam mewujudkan tercapainya tingkat kematangan UKPBJ pada level 3 “Proaktif” yaitu harus tercapainya 4 domain

(proses, kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) dengan 9 Variabel. Pada tahun 2020 Biro pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua baru mencapai 7 variabel dari 9 variabel dan masih belum terpenuhi 2 variabel yang meliputi 17 standarisasi LPSE dan pada tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melalui Bagian LPSE telah memenuhi 17 standar LPSE sehingga pencapaian 9 variabel telah terpenuhi untuk memenuhi pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level 3 proaktif. Pemenuhan 17 standar LPSE telah terpenuhi dan telah dilakukan penyerahan sertifikat oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LPSE LKPP RI “ Bapak Gatot Pambudhi Poetranto” pada tanggal 15 Desember 2021.

- b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:
- Terealisasinya penyediaan ATK
 - Terelisasinya penyediaan cetakkan/penggunaan dan dokumentasi.
 - Terealisasinya penyediaan makan minum rapat kodinasi kegiatan.
 - Terbayarnya honor tim pelaksana kegiatan.
 - Terealisasinya pengembangan aplikasi sistem informasi pengadaan Singa2.papua.go.id.
 - Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota dan dalam daerah dalam rangka pendampingan penginputan informasi pengadaan dalam aplikasi sistem informasi pengadaan.
 - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kordinasi pengembangan aplikasi sistem informasi pengadaan dan Bimbingan teknis aplikasi sistem informasi PBJ.

Realisasi capaian ini yaitu terselesaikan pengembangan aplikasi sistem informasi pengadaan yang dapat diakses pada website <https://singa2.papua.go.id/>

c. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya output sebagai berikut:

- Terbayarnya honor pejabat pengadaan.
- Terealisasinya penyediaan masker dalam rangka pencegahan Covid 19.
- Terealisasinya penyediaan ATK Kegiatan.
- Terealisasinya cetak dan penggandaan administrasi kegiatan dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Terealisasinya pengadaan UPS 7 unit.
- Terealisasinya pengadaan bahan perlengkapan kantor mendukung sistem informasi.
- Terealisasinya penyediaan makan dan minum rapat penyusunan SPM.
- Terbayarnya honor pengelola website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
- Terbayarnya honor tim penyusunan SPM.
- Terbayarnya jasa pengembangan aplikasi PBJ
- Terealisasinya pemeliharaan jaringan internet.
- Terlaksananya pekerjaan design interior Bagian LPSE.
- Terlaksananya pemeliharaan server.
- Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan aplikasi buku tamu.
- Terlaksananya pemeliharaan website
- Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota, dalam daerah dan luar daerah.

Hasil capaian pelaksanaan sub kegiatan tahun 2021 antarlain :

1. Pengembangan Aplikasi SIKAP-OAP

Pengembangan aplikasi ini sebagai sistem dalam mendata dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha Papua dalam berkiprah dan bersaing dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku usaha Papua yang telah terdaftar dalam aplikasi ini sampai dengan tahun 2021 sebanyak 541 pelaku usaha.

2. Pemeliharaan dan Pengembangan Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengembangkan website dan portal untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui informasi pengadaan barang dan jasa yaitu portal <https://ulp.papua.go.id/index.htm#> dan website <https://pengadaan.papua.go.id/>

3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa.

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini 98,38%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh capaian realisasi sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terealisasinya penyediaan ATK sub bagian.
- Terealisasinya penyediaan bahan cetak dan pelaporan sub bagian.
- Terealisasinya penyediaan bahan cetak/publikasi peningkatan kompetensi SDM PBJ.
- Terealisasinya penyediaan makan minum kegiatan.
- Terbayarnya honor narasumber/moderator, keynote speaker pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM PBJ.
- Terbayarnya honor panitia pelaksana peningkatan kompetensi SDM PBJ

- Terbayarnya honor panitia penilai angka kredit.
- Terealisasinya sewa kendaraan pelaksanaan operasional sub bagian dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM PBJ.
- Teralisannya sewa tempat pelaksanaan pertemuan peningkatan kompetensi SDM PBJ.
- Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kordinasi SDM UKPBJ dan pendampingan UKPBJ dan peningkatan kompetensi SDM UKPBJ
- Teralaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kordinasi dan konsultasi peningkatan SDM PBJ

Hasil capaian output sub kegiatan Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pelantikan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ melalui Inpassing Rekomendasi Pengangkatan dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5049/D.3/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, ditetapkan 20 org sebagai Jafung PPBJ pada Biro PBJ, denan rincian 10 orang yang telah Lulus Ujian Tertulis (tanggal 19 Pebruari 2021) dan 10 Orang Lulus melalui Ujian Portofolio. Setelah diangkat/ditetapkan menjadi peserta JF PPBJ, selanjutnya Gubernur Papua telah melantik kedua puluh orang melalui SK Gubernur Papua Nomor 821.2-1404 tanggal 6 April 2021 tentang penyesuaian/Inpassing dan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional pada Biro PBJ Setda Provinsi Papua.
2. Penyusunan Portofolio Perpindahan dari Jabatan Lain
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, LKPP RI telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Portofolio Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permohonan Mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain dari instansi kepada

LKPP melalui Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain dan penyusunan dokumen portofolio peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain.

Peserta Jafung PPBJ yang sebelumnya telah mengikuti metode Inpassing melalui Portofolio dan Ujian Tulis, namun karena masih belum lulus selanjutnya direkomendasikan mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Portofolio Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain.

Tabel 2.15.

**Pegawai Yang Mengikuti Perpindahan Dari Jabatan Lain
Melalui Uji Kompetensi Penyusunan Dokumen Portofolio
Tahun 2021**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JENJANG JF PPBJ	Hasil Uji kompetensi
1.	Leonardo Frans Samori, ST 198010022009021005	Penata Muda/ III.a	Pertama	Lulus
2.	Emosilo Kandipi, SH NIP. 19740725 200112 1 005	Penata Muda/ III.a	Pertama	Mengulang
3.	Paskalina, ST NIP. 19810420 200902 2 007	Penata Muda/ III.a	Pertama	Lulus
4.	Annies Liando, SE.,MM NIP. 19700420 199403 1 010	Penata/ III.c	Muda	Lulus
5.	Sonya Nontje Ruff, ST.,MM NIP. 19820128 201004 2 001	Penata/ III.c	Muda	Lulus
6.	Marthinus Manggaprouw, S.Pd.,M.si NIP. 19810129 200909 1 001	Penata/ III.c	Muda	Lulus
7.	Matius Monglo, S.Kom NIP. 19710815 200801 1 021	Penata Tk. I/ III.d	Muda	Lulus
8.	Mudiarto, SE NIP 19771128 200801 1 006	Penata Tk.I/III.c	Muda	Lulus
9.	Wabter Tampubolon, ST NIP. 19791228 200605 1 005	Penata Tk. I/ III.d	Muda	Lulus
10.	Haris Wakang, S.ST., MPSSp NIP 19730709 199712 1 001	Penata Tk.I/ IV.a	Madya	Lulus
Jumlah Peserta		Lulus 2021	9 Orang	
		Mengulang 2022	1 Orang	

Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain sebanyak 10 orang, terdiri dari tahap pertama 7 orang dan tahap kedua sebanyak 3 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16.

**Tahap I Pelaksanaan Ujian Kompetensi Perpindahan dari
Jabatan Lain Tahun 2021**

NO	NAMA	JENJANG JF PPBJ	WAKTU PELAKSANAAN	
			UJIAN PORTOFOLIO	UJIAN WAWANCARA
1.	Paskalina, ST NIP. 19810420 200902 2 007	Pertama	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
2.	Annie Liando, SE.,MM NIP. 19700420 199403 1 010	Muda	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
3.	Sonya Nontje Ruff, ST.,MM NIP. 19820128 201004 2 001	Muda	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
4.	Marthinus Manggaprouw, S.Pd.,M.si NIP. 19810129 200909 1 001	Muda	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
5.	Mudiarto, SE NIP. 19771128 200801 1 006	Muda	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
6.	Wabter Tampubolon, ST NIP. 19791228 200605 1 005	Muda	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021
7.	Haris Wakang, S.ST., MPSSp NIP. 19730709 199712 1 001	Madya	5-6 Nop 2021	9 Nop 2021

Tabel 2.17.

**Tahap II Pelaksanaan Ujian Kompetensi Perpindahan dari
Jabatan Lain Tahun 2021**

NO	NAMA	JENJANG JF PPBJ	WAKTU PELAKSANAAN	
			UJIAN PORTOFOLIO	UJIAN WAWANCARA
1.	Leonardo Frans Samori, ST NIP. 198010022009021005	Pertama	5-6 Nop 2021 1-2 Des 2021	4 Des 2021
2.	Emosilo Kandipi, SH NIP. 19740725 200112 1 005	Pertama	5-6 Nop 2021 1-2 Des 2021	4 Des 2021
3.	Matus Monglo, S.Kom NIP. 19710815 200801 1 021	Muda	5-6 Nop 2021 1-2 Des 2021	4 Des 2021

3. Keikutsertaan Bimtek dan Diklat PBJ Tahun 2021

- o Bimbingan Teknis Tentang Perpajakan pada PBJ

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perpajakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan di Makassar yang berlangsung Selama 6 (Enam) Hari yaitu tanggal 19 S/D 24 Desember 2021 dan diikuti 10 orang sesuai Surat Perintah Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Papua Nomor : 175/Spt-Ro.Pbj/2021 Tanggal 16 Desember 2021; dan Surat Dari Pusat

Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3i) Nomor 106/049/P3i.
Dik/X/2021 Tanggal, 29 November 2021.

- Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi SPSE 4.4
Bimbingan Teknis sekaligus kordinasi dilakukan di Kabupaten Badung berlangsung selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 07 s/d 12 Desember 2021. Bimbingan Teknis terkait Pengembangan Aplikasi SPSE 4.4 yaitu pengenalan aplikasi SPSE syang sebelumnya versi 4.3. menjadi 4.4. diman terdapat penyesuaian fitur tender/non tender, penambahan modul Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) dan perbaikan minor lainnya dan Selain itu diberikan juga pengenalan aplikasi SPSE 4.5

b. Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya output sebagai berikut:

- Terealisasinya penyediaan ATK pelaksanaan Temu Daerah UKPBJ kabupaten/kota se Provinsi Papua.
- Terealisasinya cetak administrasi da laporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan UKPBJ dan pelaksanaan temu daerah.
- Terlaksananya penyediaan makan minum kelembagaan UKPJ dan pelaksanaan temu daerah.
- Terbayarnya honor tim dan narasumber pembentukan Jafung PBJ, Panitia Temu daerah, Tim Tingkat kematangan UKPBJ.
- Terealisasinya sewa kendaraan dalam rangka pembentukan Jafung PBJ, Panitia Temu daerah, Tim Tingkat kematangan UKPBJ.
- Terealisasinya sewa tempat/ruangan dalam rangka pembentukan Jafung PBJ, Panitia Temu daerah, Tim Tingkat kematangan UKPBJ.

- Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka kordinasi kegiatan pembentukan Jafung PBJ, Panitia Temu daerah, Tim Tingkat kematangan UKPBJ

Hasil capaian output dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu :

1. Pelaksaaan Rapat Temu Daerah UKPBJ Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Pelaksanaan Temu Daerah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua bertujuan membangun komunikasi, interaksi dan kordinasi antara UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua dalam membangun persamaan persepsi dan semangat dalam mewujudkan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tanah Papua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Hotel Horison Kotaraja Kota Jayapura pada tanggal 29 Nopember 2021 yang dibuka oleh Mewakili Gubernur Papua di Jayapura. Jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan Temu Daerah yang berlangsung secara tatap muka sebanyak 100 orang, terdiri dari : Peserta yang mengikuti secara tatap muka sebanyak 65 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan temu daerah dilakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 tahun 2021 tentang tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 20219 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua serta lounching aplikasi Sikap pelaku usaha papua.

2. Terpenuhi Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ

Target UKPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*Procurement Center of Excellence*).

Hal ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berupa arah kebijakan Nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L/Pemda dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 (Level Proaktif) di 100 K/L/Pemda (34 Provinsi, 12 K/L dan 54 Kabupaten/Kota).

Sampai dengan Tahun 2020 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua baru mencapai 7 indeks dari total 9 indeks yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 proaktif. Kekurangan ini meliputi domain proses manajemen pengadaan, dan domain Sistem informasi. Dan pada tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua telah memenuhi unsur tersebut dengan melakukan pemenuhan dokumen terhadap manajemen pengadaan dan system informasi yaitu pemenuhan 17 standart LPSE yang manan tahun tahun 2020 baru terpenuhi 12 standart. Adapun standart yang belum terpenuhi yaitu standart pengelolaan keamanan perangkat LPSE yang merupakan standart pemenuhan dalam infrastuktur LPSE dengan keamanan informasi.

3. Pelantikan Jabatan Fungsional PPBJ

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 821.2-1290 tentang Pengangkatan Pertama, dan Kedua Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional, telah dilantik 20 Orang JF PPBJ dari total keseluruhan 72 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dilantik oleh Sekda Papua Dance Yulian Flassy, SE, MSi atas nama Gubernur

Papua Lukas Enembe, SIP, MH di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.

c. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terealisasinya penyediaan ATK sub bagian, Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terealisasinya penyediaan cetakan bahan kegiatan, dokumentasi, publikasi dan laporan sub bagian, Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terealisasinya penyediaan bahan komputer flashdisk kegiatan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terealisasinya penyediaan makan minum rapat internal dan penyelenggaraan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terbayarnya honor narasumber, panitai penyelenggaraan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terealisasinya keikutsertaan pokja PPBJ dan ASN/Non ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam pelaksanaan diklat/bimtek.
- Terealisasinya sewa kendaraan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Terealisasinya sewa tempat pertemuan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ.
- Tersusunnya dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Peraturan

Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua.

- Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah dalam rangka kordinasi/konsultasi, pelaksanaan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ, Bimtek pengadaan barang dan jasa dan diklat sertifikasi barang jasa.

Hasil capaian output sub kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/jasa.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 11-12 Nopember 2021 dengan sasaran peserta difokuskan pada 20 pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 16 Nopember 2021 dengan sasaran peserta pejabat struktural dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 50 orang dengan tujuan dapat lebih memahami dan memitigasi resiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Keikutsertaan Dalam Diklat PBJ Tahun 2021
 - Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Keikutsertaan Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar sebanyak 17 orang dan yang lulus sebanyak 8 orang. Pegawai Biro pengadaan barang dan

jasa Setda Provinsi Papua yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar yaitu :

1. Herson Martinus
 2. Neltje Safkaur
 3. Dessy Elisabeth Kambuaya
 4. Paulus Waimbo
 5. Saletina Hariani
 6. Edwin M.P Rahareng
 7. Sadam Abdullah (staf honorer)
 8. Timotius
- Mengikuti Bimbangan Teknis Perlem 12 Tahun 2021 di Jakarta yang diikuti oleh pejabat struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 9 orang.
 - Melaksanakan studi bandi tentang pengelolaan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Badung Bali.

C. Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi anggaran pelaksanaan 2 program Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.18.

Rekapitulasi Anggaran Per Program Tahun 2021

N O	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.125.430.110	20.908.723.108	86,67
2	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	27.585.402.364	25.844.377.543	93,69
	JUMLAH	51.710.832.474	46.753.100.651	90,41

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, pada tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melaksanakan 2 program yaitu

Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan total anggaran Rp. 51.710.832.474,- terealisasi sebesar Rp. 46.753.100.651,- atau 90,41% terdiri dari realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 86,67% dan Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 93,69%.

Dari realisasi anggaran 2 program yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dirinci menurut kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.19.

**Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	Realisasi	%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.125.430.110	20.908.723.108	86,67
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.000.000	103.557.500	36,34
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	200.000.000	21.266.000	10,63
	• Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	27.500.000	91,67
	• Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	29.900.000	99,67
	• Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar realisasi kinerj SKPD	25.000.000	24.891.500	99,57
	b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	9.016.212.870	7.294.904.412	80,91
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan sKPD	8.951.212.870	7.284.604.412	81,38
	• Kordinasi dan penyusunan Laporan euangan Akhir Tahun	30.000.000	1.900.000	6,33
	• Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	35.000.000	8.400.000	24,00
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawain perangkat daerah	2.929.900.000	2.373.252.070	81,00
	• Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	310.000.000	306.867.000	98,99
	• Pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2.619.900.000	2.066.385.070	78,87
	d. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	8.293.767.240	7.632.417.944	92,03
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.450.000	608.189.400	92,51
	• Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	700.000.000	700.000.000	100,00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	75.000.000	100,00
	• Penyediaan Bahan/material	1.463.617.240	1.434.287.680	98,00
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.050.000.000	2.049.850.000	99,99

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.347.700.000	2.765.090.864	82,60
e.	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Umum pemerintah daerah	1.009.500.000	967.587.000	95,85
	• Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	645.000.000	611.000.000	94,73
	• Pengadaan Mebel	364.500.000	356.587.000	97,83
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.500.000	1.821.822.000	99,91
	• Penyediaan jasa Surat Menyurat	1.006.000.000	1.005.186.000	99,92
	• Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	817.500.000	816.636.000	99,89
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	767.550.000	715.182.182	93,18
	• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	367.550.000	356.785.182	97,07
	• Pemeliharaan aset tetap lainnya	100.000.000	70.000.000	70,00
	• Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dengan bangunan lainnya	300.000.000	288.397.000	96,13
2	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	27.585.402.364	25.844.377.543	93,69
a.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	17.255.276.728	15.745.099.087	91,25
	• Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan jasa	841.083.728	840.985.728	99,99
	• Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	15.497.095.000	13.987.015.359	90,26
	• Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa	917.098.000	917.098.000	100,00
b.	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6.665.125.636	6.461.885.679	96,95
	• Pengelolaan sistem secara elektronik	4.000.000.000	3.805.896.578	95,15
	• Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	500.000.000	499.993.399	100,00
	• Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	2.165.125.636	2.155.995.702	99,58
c.	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	3.665.000.000	3.637.392.777	99,25
	• Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	755.000.000	744.656.800	98,63
	• Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1.010.000.000	1.003.838.400	99,39
	• Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	1.900.000.000	1.888.897.577	99,42

2.2. ISU-ISU PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut:

- 1) Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang baru terbentuk pada tahun 2020, kualitas SDM dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan di lingkup pengadaan barang dan jasa belum optimal.
- 2) Biro PBJ belum didukung dengan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PF PPBJ), saat ini Biro PBJ hanya didukung oleh Kelompok Kerja dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang masih bersifat Ad Hoc.
- 3) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4) Belum memadainya SDM pengelola PBJ, sarana prasarana termasuk akses jaringan internet.
- 5) Data pengusaha lokal atau Orang Asli Papua (OAP) belum terintegrasi dengan SPSE dan Aplikasi perencanaan dan penganggaran.
- 6) Belum terpenuhinya standarisasi LPSE yang berpengaruh pada pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

2.3. RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023.

Sesuai Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang merupakan tahapan ke 5 dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dimana sesuai kondisi kondisi yang sedang berlangsung (existing condition) dalam pembangunan yang tengah dilakukan. Perioritas pembangunan tahun 2023 adalah memastikan pencapaian semua tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2019-2023 dapat terlaksana sesuai kondisi daerah dan kemampuan keuangan. Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023

yaitu **“Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**

Penyusunan RENJA Tahun 2023 berisikan usulan rencana kerja program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja telah menyesuaikan RPJMD Pemerintah Provinsi Papua dan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun sasaran target rencana kerja Biro Pengadaan Barnag dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai Berikut :

Tabel 3.1.

Target Capaian Sasaran Strategis

Biro Pegadaan Barnag dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	6
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	Persen	100
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	60
		Mempertahan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Level	3
		Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	Persen	100
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD

Provinsi Papua sebesar Rp. **37.876.600.200**. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 seperti yang tersaji pada tabel 3.2 berikut ini :

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

Tabel 3.2. RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023											
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Pagu Tahun 2023	Sumberd ana	Lokasi	Keterangan
(Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan / Indikator)											
4.01					SEKRETARIAT DAERAH			37.876.600.200,00			
4.01	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22.476.600.200,00			
4.01	1	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			524.800.000,00			
4.01	1	1.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			294.800.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.01	1	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	294.800.000,00			
4.01	1	1.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.01	2	1		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	100.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
4.01	1	1.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.01	3	1		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	30.000.000,00			
4.01	1	1.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.01	6	1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	100.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

						Kinerja SKPD					
4.01	1	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.471.800.200,00			
4.01	1	1.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.331.800.200,00	Dana Alokasi Umum	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.02	1	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	7.331.800.200,00			
4.01	1	1.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.02	5	1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.02	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.02	6	1		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	30.000.000,00			
4.01	1	1.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.02	7	1		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	30.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.02	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.02	8	1		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	30.000.000,00			
4.01	1	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000,00			
4.01	1	1.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.03	6	1		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	30.000.000,00			
4.01	1	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.800.000.000,00			
4.01	1	1.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			600.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.05	2	1		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	93	600.000.000,00			
4.01	1	1.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.05	9	1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	500.000.000,00			
4.01	1	1.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.05	10	1		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	700.000.000,00			
4.01	1	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.600.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	1	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000,00			
4.01	1	1.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	2	1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	200.000.000,00			
4.01	1	1.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.06	4	1		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1.500.000.000,00			
4.01	1	1.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			800.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	5	1		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	800.000.000,00			
4.01	1	1.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			70.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	6	1		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	70.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.06	7		Penyediaan Bahan/Material			800.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	7	1		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	800.000.000,00			
4.01	1	1.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu			200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	8	1		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	200.000.000,00			
4.01	1	1.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.06	9	1		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4.000.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.400.000.000,00			
4.01	1	1.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.07	2	1		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	400.000.000,00			
4.01	1	1.07	5		Pengadaan Mebel			500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.07	5	1		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	500.000.000,00			
4.01	1	1.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.07	11	1		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	500.000.000,00			
4.01	1	1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.050.000.000,00			
4.01	1	1.08	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.08	1	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	300.000.000,00			
4.01	1	1.08	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.08	2	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	100.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.08	3	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000,00			
4.01	1	1.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.08	4	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	2.500.000.000,00			
4.01	1	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	1	1.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.09	1	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	400.000.000,00			
4.01	1	1.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.09	6	1		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	100.000.000,00			
4.01	1	1.09	7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	1	1.09	7	1		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	100.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	7				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			15.400.000.000,00			
4.01	7	1.01			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			5.400.000.000,00			
4.01	7	1.01	1		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			1.700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.01	1	1		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3	1.700.000.000,00			
4.01	7	1.01	2		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.01	2	1		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.700.000.000,00			
4.01	7	1.01	3		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			2.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Papua	Usulan Disetujui

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	7	1.01	3	1		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	2.000.000.000,00			
4.01	7	1.02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		5.000.000.000,00			
4.01	7	1.02	1			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		2.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Dki Jakarta, Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.02	1	1		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	2.500.000.000,00			
4.01	7	1.02	2			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		1.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.02	2	1		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.500.000.000,00			

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	7	1.02	3		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.02	3	1		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.000.000.000,00			
4.01	7	1.03			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			5.000.000.000,00			
4.01	7	1.03	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			1.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui
4.01	7	1.03	1	1		Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100	1.500.000.000,00			
4.01	7	1.03	2		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.710.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

4.01	7	1.03	2	1		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.710.000.000,00				
4.01	7	1.03	3		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			1.790.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	Usulan Disetujui	
4.01	7	1.03	3	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.790.000.000,00				
TOTAL									37.876.600.200,00			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada Tahun 2023.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

LAMPIRAN

RENCANA KERJA
4.01.0.00.0.00.01.12. BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

Kode (Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan / Indikator)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program / Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Sampai Dengan Tahun Berjalan		Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Pagu Tahun 2023	Sumberdana	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Keterangan
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)						
4.01		SEKRETARIAT DAERAH									37.876.600.200,00				
4.01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									22.476.600.200,00				
4.01 01 1.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									524.800.000,00				
4.01 01 1.01 001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									294.800.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01 01 1.01 001 1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	1	-	1	1	-	1	294.800.000,00				
4.01 01 1.01 002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01 01 1.01 002 1		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	-	1	1	-	1	100.000.000,00				
4.01 01 1.01 003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01 01 1.01 003 1		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	-	1	1	-	1	30.000.000,00				

4.01	01	1.01	006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.01	006	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	-	1	1	-	1	100.000.000,00				
4.01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7.471.800.200,00				
4.01	01	1.02	001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									7.331.800.200,00	Dana Alokasi Umum	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.02	001	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	65	65	-	65	65	-	65	7.331.800.200,00				
4.01	01	1.02	005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									50.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.02	005	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	-	1	1	-	1	50.000.000,00				
4.01	01	1.02	006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.02	006	1	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	-	0	0	-	1	30.000.000,00				
4.01	01	1.02	007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.02	007	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1	1	1	-	1	1	-	1	30.000.000,00				

4.01	01	1.02	008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.02	008	1	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	-	0	0	-	1	30.000.000,00					
4.01	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										30.000.000,00				
4.01	01	1.03	006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.03	006	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	-	0	0	-	1	30.000.000,00					
4.01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1.800.000.000,00				
4.01	01	1.05	002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										600.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.05	002	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	-	0	0	-	93	600.000.000,00					
4.01	01	1.05	009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.05	009	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	-	0	0	-	30	500.000.000,00					
4.01	01	1.05	010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.05	010	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	-	0	0	-	20	700.000.000,00					
4.01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										7.600.000.000,00				
4.01	01	1.06	001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										30.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.06	001	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0	0	0	-	0	0	-	1	30.000.000,00					

4.01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.400.000.000,00				
4.01	01	1.07	002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.07	002	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	2	2	-	0	0	-	1	400.000.000,00					
4.01	01	1.07	005		Pengadaan Mebel										500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.07	005	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	-	0	0	-	1	500.000.000,00					
4.01	01	1.07	011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.07	011	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	0	0	-	1	500.000.000,00					
4.01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.050.000.000,00				
4.01	01	1.08	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat										300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.08	001	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	-	0	0	-	1	300.000.000,00					
4.01	01	1.08	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.08	002	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	-	0	0	-	1	100.000.000,00					
4.01	01	1.08	003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.08	003	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	-	0	0	-	1	150.000.000,00					

4.01	01	1.08	004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										2.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.08	004	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	-	29	29	-	29	2.500.000.000,00				
4.01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										600.000.000,00				
4.01	01	1.09	001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.09	001	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	0	-	0	0	-	15	400.000.000,00				
4.01	01	1.09	006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.09	006	1		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	-	0	0	-	10	100.000.000,00				
4.01	01	1.09	007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										100.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	01	1.09	007	1		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	-	0	0	-	1	100.000.000,00				
4.01	07				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										15.400.000.000,00				
4.01	07	1.01			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										5.400.000.000,00				
4.01	07	1.01	001		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa										1.700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	07	1.01	001	1		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	-	1	1	-	3	1.700.000.000,00				
4.01	07	1.01	002		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa										1.700.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui

4.01	07	1.01	002	1		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	-	1	1	-	1	1.700.000.000,00					
4.01	07	1.01	003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									2.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Papua	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui	
4.01	07	1.01	003	1		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	-	1	1	-	1	2.000.000.000,00					
4.01	07	1.02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									5.000.000.000,00					
4.01	07	1.02	001			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									2.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Dki Jakarta, Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui	
4.01	07	1.02	001	1		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1	-	1	1	-	1	2.500.000.000,00					
4.01	07	1.02	002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									1.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui	
4.01	07	1.02	002	1		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	-	0	0	-	1	1.500.000.000,00					
4.01	07	1.02	003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									1.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui	
4.01	07	1.02	003	1		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	-	0	0	-	1	1.000.000.000,00					
4.01	07	1.03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									5.000.000.000,00					
4.01	07	1.03	001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									1.500.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui	
4.01	07	1.03	001	1		Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50	50	50	-	20	20	-	100	1.500.000.000,00					

4.01	07	1.03	002		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa										1.710.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	07	1.03	002	1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	-	1	1	-	1		1.710.000.000,00				
4.01	07	1.03	003		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa										1.790.000.000,00	Dana Otonomi Khusus Block Grant	Kota Jayapura	4.01.0.00.0.00.01.12. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Usulan Disetujui
4.01	07	1.03	003	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	-	1	1	-	1		1.790.000.000,00				
TOTAL														37.876.600.200,00					

MENGETAHUI,
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

(DEBORA D. SALOSA, S.HUT, MM)
NIP. 197712232002122010

.....

()
NIP.